
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUMBAWA

*Reny Wardiningsih¹, Dwiwana Ramadhani², Rini Adriani Auliana³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

*Coessponding email: reny.wardi@staff.unram.ac.id

Abstract

State-Owned Asset (Barang Milik Negara/BMN) management is a crucial component of public financial governance, as it supports the implementation of institutional duties and functions while optimizing the utilization of state assets. This study aims to analyze the implementation of BMN management and identify the challenges faced at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Type Madya Pabean C Sumbawa. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that BMN management has been implemented in accordance with the established management cycle, including planning, procurement, utilization, maintenance, administration, as well as supervision and control. The use of information systems such as SIMAN and SAKTI has contributed to improving data accuracy, transparency, and accountability in asset management. However, several challenges remain, including the existence of idle assets, unauthorized use of assets by external parties, and discrepancies between physical assets and recorded data. These findings suggest that although BMN management has been properly implemented, it has not yet been fully optimized, particularly in terms of asset utilization and supervision. Therefore, improvement efforts are required through strengthening internal controls, optimizing asset utilization, and enhancing data management systems to improve the overall effectiveness and accountability of BMN management.

Keywords: State-Owned Assets, Asset Management, SIMAN, SAKTI, Non-Tax State Revenue (PNBP)

Abstract

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi serta optimalisasi pemanfaatan aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan BMN dan mengidentifikasi tantangan yang

dihadapi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan siklus yang ditetapkan, meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan sistem informasi seperti SIMAN dan SAKTI turut mendukung peningkatan akurasi dan transparansi pengelolaan aset. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain adanya BMN yang terindikasi idle, pemanfaatan aset secara ilegal oleh pihak eksternal, serta perbedaan antara data fisik dan data dalam sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN sudah bagus nama belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pemanfaatan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sistem pencatatan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Pengelolaan Aset, SIMAN, SAKTI, PNBP

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset publik. BMN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang operasional instansi pemerintah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dioptimalkan guna mendukung penerimaan negara, khususnya melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, pengelolaan BMN yang optimal menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Mardiasmo, 2018). Dalam praktiknya, pengelolaan BMN masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan aspek pengamanan dan pemanfaatan aset. Pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa, masih ditemukan beberapa aset berupa tanah dan/atau bangunan yang mengalami permasalahan, khususnya terkait pemanfaatan oleh pihak lain tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik dari sisi kehilangan aset maupun hilangnya peluang pemanfaatan yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi (Halim, 2014).

Tabel 1 menggambarkan kondisi aset bermasalah pada KPPBC TMP C Sumbawa, termasuk jenis aset, lokasi, serta bentuk permasalahan yang terjadi. Penyajian tabel tersebut memberikan gambaran empiris mengenai bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan BMN yang masih terjadi di lapangan.

Tabel 1 Data Aset Bermasalah Pada KPPBC TMP C Sumbawa

No	Nama BMN	Alamat	Permasalahan
1	Tanah dan Bangunan	Desa Labuan Aji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa	Bangunan ditempati pihak lain tanpa izin
2	Tanah dan Bangunan	Desa Labuan Aji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa	Bangunan ditempati pihak lain tanpa izin
3	Tanah	Desa Dalam, Kec. Alas, Kab. Sumbawa	Terdapat Pos Ronda yang dibangun tanpa izin
4	Tanah	Desa Pukat, Kec. Utan, Kab. Sumbawa	Tanah dipagari oleh pihak lain tanpa izin
5	Tanah dan Bangunan	Desa Pukat, Kec. Utan, Kab. Sumbawa	Bangunan dimanfaatkan pihak lain untuk pengoperasian televisi kabel dan penempatan parabola

Sumber: Subbagian Umum

Permasalahan pengelolaan BMN juga memiliki keterkaitan erat dengan optimalisasi PNBPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Secara empiris, realisasi PNBPN pada KPPBC TMP C Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan BMN sebagai sumber penerimaan negara belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Padahal, pengelolaan BMN yang efektif dapat mendorong peningkatan PNBPN melalui berbagai mekanisme seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun pemindahtanganan aset sesuai ketentuan yang berlaku (Siregar, 2020).

Tabel 2. Data Penerimaan KPPBC TMP C Sumbawa

	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	PNBP
2022	Rp113.7	Rp1.335.1	Rp77.2	Rp1.1
2023	Rp110.2	Rp2.462.1	Rp229.	Rp1.1
2024	Rp97.6	Rp3.607.1	Rp178.	Rp93.
2025*	Rp32.1	Rp17.2	Rp193.-----	Rp5.2

Catatan/Notes : *Data sementara hingga September 2025

Sumber: Seksi Perbendaharaan

Tabel 2 menunjukkan data penerimaan KPPBC TMP C Sumbawa, termasuk komponen PNBP, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai fluktuasi penerimaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan BMN sebagai sumber penerimaan negara belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Padahal, pengelolaan BMN yang efektif dapat mendorong peningkatan PNBP melalui berbagai mekanisme seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun pemindahtanganan aset sesuai ketentuan yang berlaku (Siregar, 2004).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas sistem administrasi, efektivitas pengawasan, serta kompetensi sumber daya manusia (Kemala, 2021). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik juga menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan aset negara (Sesylia & Anarys, 2026). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek administratif pengelolaan BMN dan belum banyak mengkaji secara spesifik keterkaitan antara implementasi pengelolaan BMN dengan optimalisasi PNBP, khususnya pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara teoritis, pengelolaan BMN mengacu pada konsep manajemen aset publik yang meliputi proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusan aset (Siregar, 2020). Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengelolaan aset harus berorientasi pada prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga aset yang dimiliki pemerintah dapat memberikan manfaat optimal baik secara ekonomi maupun sosial (Tempati et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu terkait bagaimana implementasi pengelolaan BMN di tingkat operasional serta tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual pengelolaan BMN, khususnya pada KPPBC TMP C Sumbawa, yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pengamanan dan pemanfaatan aset. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan BMN di KPPBC TMP C Sumbawa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang aplikatif dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN dan optimalisasi PNBP. Selain itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

literatur terkait pengelolaan aset negara, khususnya pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara (BMN) merupakan seluruh aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah, yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks modern, BMN tidak hanya dipandang sebagai aset administratif, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah bagi negara (Tranggana, 2024). BMN memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Oleh karena itu, pengelolaan BMN harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan nilai guna aset.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan aset. Pengelolaan yang baik menuntut adanya sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data aset (Adithya & Santoso, 2024). Selain itu, efektivitas pengelolaan BMN juga sangat dipengaruhi oleh implementasi sistem informasi seperti SIMAN dan SIMAK-BMN yang mampu meningkatkan kualitas pelaporan serta pengawasan aset negara. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan kompetensi SDM dan rendahnya tingkat adopsi teknologi (Labuhane et al., 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan BMN juga menghadapi tantangan dalam hal pengendalian internal dan efektivitas sistem, meskipun sistem yang digunakan telah mampu mendukung proses pengelolaan aset secara umum (Tranggana, 2024).

3. Pemanfaatan BMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemanfaatan BMN merupakan upaya pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan secara langsung untuk mendukung tugas dan fungsi instansi, dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi maupun finansial. Pemanfaatan ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti kerja sama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan dalam proyek pembangunan (Ansari & Yohanes, 2026). Optimalisasi pemanfaatan BMN memiliki peran penting dalam meningkatkan PNBP. Aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat agar aset negara dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara.

4. Sistem Informasi dalam Pengelolaan BMN

Perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Sistem informasi berbasis digital memungkinkan pencatatan aset secara real-time, memudahkan pelacakan aset, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan (Tempati et al., 2025). Namun demikian, implementasi sistem informasi dalam pengelolaan BMN masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan pengguna, serta resistensi terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BMN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusia.

5. Tantangan dalam Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun hukum. Salah satu tantangan utama adalah pengamanan aset, terutama terkait dengan risiko penyalahgunaan atau penguasaan aset oleh pihak yang tidak berwenang (Suprianto et al., 2019). Selain itu, aspek regulasi dan implementasi kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan BMN. Studi literatur menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset negara, seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan belum optimalnya pengawasan (Labuhane et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta tantangan yang dihadapi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sumbawa. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman proses dan permasalahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di KPPBC TMP C Sumbawa pada tahun 2025. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan BMN serta observasi terhadap kondisi dan pengelolaan aset. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan BMN, data aset bermasalah, data PNBP, serta literatur dan regulasi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dengan kriteria pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan BMN. Analisis data menggunakan model interaktif

yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sumbawa merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tidak hanya berperan dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN menjadi aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang menuntut prinsip tertib administrasi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset. Pelaksanaan pengelolaan BMN di KPPBC TMP C Sumbawa mengacu pada berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan pengelolaan BMN mencakup beberapa siklus utama, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Setiap tahapan tersebut memiliki prosedur dan standar operasional masing-masing, yang diterapkan dengan tingkat efektivitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif. Berikut penjabaran dari masing-masing siklus pengelolaan BMN:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang memuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas kerja. Di KPPBC TMP C Sumbawa, penyusunan RKBMN telah dilaksanakan secara sistematis dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahunan. Usulan tersebut kemudian dianalisis oleh pejabat pengelola BMN untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketersediaan BMN yang ada, urgensi operasional, dan pagu anggaran. RKBMN ini kemudian menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan satuan kerja. Pelaksanaannya cukup efektif, namun terkadang menghadapi kendala perubahan kebutuhan mendadak atau keterbatasan informasi kondisi riil barang.

Selain itu, penyusunan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN (RP4 BMN) turut mendukung perencanaan strategis pengelolaan aset. Meskipun demikian, pelaksanaan tahap ini masih menghadapi kendala berupa perubahan kebutuhan yang bersifat dinamis serta keterbatasan informasi kondisi riil aset, yang dapat memengaruhi akurasi perencanaan (Nasution et al., 2024).

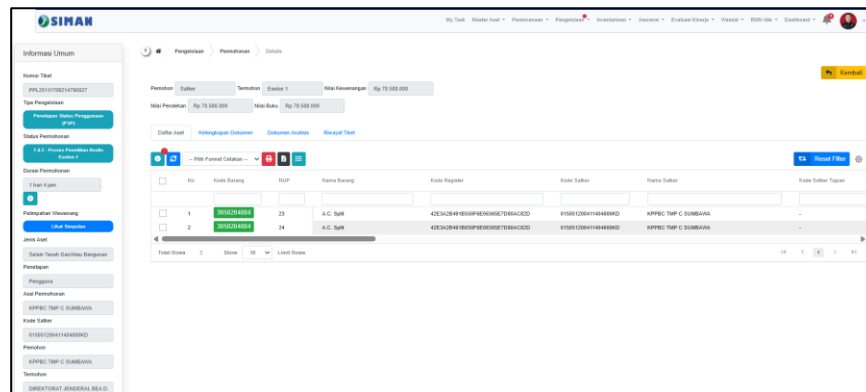
2. Pengadaan BMN

Pengadaan BMN dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah direncanakan, dengan memanfaatkan mekanisme pengadaan pemerintah seperti e-purchasing dan katalog elektronik. Proses ini telah berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai kendala seperti keterlambatan distribusi barang, keterbatasan penyedia di daerah, serta ketidaksesuaian minor spesifikasi barang yang diterima. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor geografis dan ketersediaan vendor memengaruhi efektivitas pengadaan barang pemerintah (Alamsyah et al., 2025). Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Sumbawa telah melakukan pengadaan barang berupa A.C Split yang tertuang dalam berita acara serah terima nomor BAST-21/KBC.1304/PPK/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

3. Penggunaan BMN

BMN yang telah diperoleh digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, baik dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, maupun administrasi. Penetapan status penggunaan menjadi aspek penting untuk menjamin legalitas dan kejelasan tanggung jawab atas aset. Di KPPBC TMP C Sumbawa, penetapan status penggunaan telah dilakukan melalui aplikasi SIMAN dan didukung dengan penunjukan penanggung jawab aset. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan BMN yang menekankan pentingnya kejelasan status dan akuntabilitas penggunaan aset (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, 2021)

Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Sumbawa telah mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan A.C Split melalui aplikasi SIMAN dan nota dinas nomor ND-813/KBC.1304/2025 tanggal 17 November 2025. Selain itu, penetapan pengguna aset dilakukan melalui penyerahan tanggung jawab kepada pejabat atau pegawai yang berwenang yang dibuktikan dengan surat penunjukkan dari kepala kantor selaku Kuasa Pengguna Barang. Mekanisme ini memastikan bahwa suatu aset memiliki penanggung jawab yang jelas.



Gambar 1. Tangkapan Layar Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan pada Aplikasi SIMAN
Sumber: Aplikasi SIMAN

4. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN bertujuan untuk mengoptimalkan nilai guna aset melalui skema seperti sewa atau pinjam pakai. Di KPPBC TMP C Sumbawa, pemanfaatan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan nilai ekonomi. Namun demikian, ditemukan adanya indikasi pemanfaatan aset secara ilegal oleh pihak eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan serta percepatan penetapan status pemanfaatan secara resmi guna menghindari potensi kerugian negara (Halim, 2014).

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan BMN dilakukan melalui pendekatan fisik, administratif, dan hukum, sedangkan pemeliharaan dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kondisi aset. Implementasi di KPPBC TMP C Sumbawa telah berjalan cukup baik, didukung oleh sistem pemantauan berbasis aplikasi internal. Namun, keterbatasan anggaran dan minimnya penyedia jasa teknis di daerah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemeliharaan yang optimal (Cornelia, 2026).

Sebagai bentuk transparansi dan pendukung evaluasi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya pada aspek pemeliharaan, KPPBC TMP C Sumbawa memiliki dashboard pada aplikasi internal kantor (Aplikasi SU-Connect) yang menampilkan data pemeliharaan kendaraan dinas.

No.	Nama Barang	Merk	No. Polisi	Pemangku Jawab	Servis dan Ganti Oli Terakhir	Servis dan Ganti Oli Selanjutnya	REMANDER
1	Station Wagon	Mit		into	16-Jul-25	16-Jan-26	55 Hari Terlalu
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toj		Khurrohmah	10-Jan-25	10-Dec-25	18 Hari Terlalu
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toj		Kusumo	20-Jan-25	20-Dec-25	28 Hari Terlalu
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toj		n	11-Jun-25	11-Dec-25	19 Hari Terlalu
5	Sepeda Motor	Ho		into	13-Jan-25	13-Feb-25	282 Hari Terlalu
6	Sepeda Motor	Ya		s	8-Jan-25	8-Feb-25	287 Hari Terlalu
7	Sepeda Motor	Ya		adhani	8-May-25	8-Jun-25	167 Hari Terlalu
8	Sepeda Motor	Ya		Onemay	-	-	-
9	Sepeda Motor Patrol	KL		riyaka	-	-	-
10	Ran Patrol	Nis		angan Matsu	15-May-25	15-Nov-25	7 Hari Terlalu
11	Ran Patrol	Al		angan Matsu	-	-	-

Gambar 2. Tangkapan Layar Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Aplikasi SU-Connect KPPBC TMP C Sumbawa

Sumber: Aplikasi SU-Connect

6. Penilaian BMN

Penilaian BMN dilakukan untuk menentukan nilai aset secara objektif sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Di KPPBC TMP C Sumbawa, penilaian dilakukan melalui aplikasi SIMAN yang secara otomatis menghitung nilai perolehan, penyusutan, dan nilai buku. Hal ini mendukung penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020). Nilai suatu aset telah tercatat pada aplikasi SIMAN, mulai dari nilai perolehan aset, nilai penyusutan, hingga nilai buku. Nilai penyusutan dan nilai buku tersebut merupakan hasil perhitungan otomatis dari aplikasi SIMAN. Berikut data terkait nilai BMN pada salah satu aset KPPBC TMP C Sumbawa.

[illegible]

Gambar 3. Tangkapan Layar Data Nilai BMN pada Aplikasi SIMAN
Sumber: Aplikasi SIMAN

7. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan

BMN yang sudah tidak diperlukan atau tidak dapat dipergunakan lagi dapat dialihkan melalui mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan. Setiap prosesnya memerlukan pemeriksaan fisik, pengusulan resmi, serta persetujuan dari instansi vertikal.

Dalam implementasinya, proses ini berjalan sesuai ketentuan namun tak jarang memerlukan waktu cukup panjang akibat prosedur birokratis. Efektivitas proses ini sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen serta koordinasi antarunit kerja (Labuhane & Rahman, n.d.) Sebagai bagian dari analisis terhadap implementasi pengelolaan BMN, penting untuk melihat bagaimana proses pemindahtanganan dilaksanakan pada tingkat satuan kerja. Oleh karena itu, pada bagian berikut disajikan data pemindahtanganan BMN KPPBC TMP C Sumbawa tahun 2025.

8. Penatausahaan BMN

Penatausahaan dilakukan melalui pencatatan aset dalam aplikasi SAKTI, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), serta inventarisasi fisik secara berkala. Secara umum, penatausahaan di KPPBC TMP C Sumbawa telah berjalan tertib, namun masih ditemukan perbedaan antara data sistem dan kondisi fisik akibat keterlambatan pembaruan data. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi sistem informasi dan disiplin pencatatan dalam pengelolaan aset (Ansari & Yohanes, 2026). Salah satu bentuk implementasi Penatausahaan BMN KPPBC pada TMP C Sumbawa ialah pencatatan transaksi masuk dan transaksi keluar barang persediaan kantor. Seluruh transaksi tersebut dilakukan pencatatan oleh operator BMN pada Aplikasi SAKTI. Berikut data pencatatan transaksi keluar barang persediaan KPPBC TMP C Sumbawa Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI.

No Dokumen	No Bukti	Tgl Dokumen	Tgl Pembukuan	Total Harga	Status
015051200411404000K0202500001K	SPMB-1/NBC1304/2025	31-01-2025	31-01-2025	2.772.150	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500002K	SPMB-2/NBC1304/2025	28-02-2025	28-02-2025	1.560.770	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500003K	SPMB-3/NBC1304/2025	31-03-2025	31-03-2025	1.964.500	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500004K	SPMB-4/NBC1304/2025	30-04-2025	30-04-2025	1.288.500	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500005K	SPMB-5/NBC1304/2025	30-05-2025	30-05-2025	3.633.100	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500006K	SPMB-6/NBC1304/2025	30-05-2025	30-05-2025	426.000	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500007K	SPMB-7/NBC1304/2025	26-02-2025	02-06-2025	1.332.650	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500008K	SPMB-8a/NBC1304/2025	27-02-2025	02-06-2025	117.240	Sudah Disetujui
015051200411404000K0202500009K	SPMB-2a/NBC1304/2025	10-03-2025	02-06-2025	96.920	Sudah Disetujui

Gambar 4. Tangkapan Layar Data Pencatatan Transaksi Keluar Barang Persediaan pada Aplikasi SAKTI
Sumber: Aplikasi SAKTI

9. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku melalui pemantauan, pemeriksaan fisik, dan reviu dokumen. Pelaksanaan di KPPBC TMP C Sumbawa dilakukan secara periodik dan insidentil, serta dilaporkan secara berjenjang. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) guna mencegah terjadinya penyimpangan (BPKP, 2018). Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Sumbawa telah melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan dilaporkan secara

berjenjang kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan melalui nota dinas nomor ND-468/KBC.1304/2025 tanggal 3 Juli 2025.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen penting dalam tata kelola keuangan negara yang menuntut adanya tertib administrasi, kejelasan status hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa, pengelolaan BMN tidak hanya berorientasi pada pencatatan aset, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, 2021)

Dalam praktiknya, pengelolaan BMN melibatkan berbagai tahapan yang saling terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Setiap tahapan tersebut memerlukan dukungan sistem administrasi yang tertib, sumber daya manusia yang kompeten, serta alokasi anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), KPPBC TMP C Sumbawa telah berupaya melaksanakan seluruh tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dinamika operasional di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BMN (Suprianto et al., 2019). Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, berikut beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dalam pengelolaan BMN di KPPBC TMP C Sumbawa:

1. BMN Terindikasi Idle

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah adanya BMN yang terindikasi idle, yaitu aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, tidak digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi instansi, serta tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Keberadaan BMN idle berpotensi menimbulkan inefisiensi, seperti beban biaya pemeliharaan, penurunan nilai aset, serta hilangnya peluang pemanfaatan ekonomi melalui skema sewa atau kerja sama pemanfaatan (Mardiasmo, 2018). Hasil observasi menunjukkan bahwa aset yang termasuk kategori idle umumnya berupa tanah, bangunan kantor, dan rumah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Identifikasi aset dilakukan melalui pengecekan fisik, verifikasi dokumen, serta pencocokan data pada aplikasi SIMAN. Sebagai upaya penanganan, KPPBC TMP C Sumbawa telah melakukan pemetaan ulang, pembaruan data, serta

penyusunan rekomendasi pemanfaatan guna meningkatkan nilai guna aset di masa mendatang.

2. Pemanfaatan Aset Secara Ilegal

Tantangan berikutnya adalah adanya pemanfaatan BMN secara ilegal oleh pihak eksternal tanpa dasar hukum yang sah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan serta belum tersusunnya kebijakan pemanfaatan aset secara formal. Pemanfaatan ilegal tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas fisik aset akibat penggunaan yang tidak terkontrol (Siregar, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa aset yang berlokasi di luar area kantor utama cenderung lebih rentan dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengawasan serta belum adanya penetapan status pemanfaatan secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan langkah penertiban yang lebih tegas serta optimalisasi pemanfaatan aset secara legal untuk meminimalkan potensi kerugian negara. Berikut disajikan data mengenai aset yang terindikasi dimanfaatkan secara ilegal pada periode penelitian

Tabel 3. Data Pemanfaatan BMN Secara Ilegal

No	Nama	Alamat	Permasalahan
1	Bangunan Kantor	Tarano, Sumbawa	Menjadi tempat tinggal pihak ketiga tanpa izin
2	Bangunan Kantor	Tarano, Sumbawa	Menjadi tempat tinggal pihak ketiga tanpa izin
3	Bangunan Kantor	Labu Pade, Sumbawa	Menjadi tempat pemasangan server dan antena tv tanpa izin
4	Tanah	Kota Bima	Dibangun rumah tanpa izin
5	Tanah	Alas, Sumbawa	Dibangun pos ronda tanpa izin

Sumber: Subbagian Umum

3. Perbedaan Data Fisik dan Dokumen

Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara data fisik BMN dengan data yang tercatat dalam dokumen maupun aplikasi SAKTI. Kesesuaian data merupakan aspek penting dalam penatausahaan BMN karena berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan serta pengambilan keputusan (BPKP, 2018). Perbedaan

data yang ditemukan meliputi selisih jumlah barang, ketidaksesuaian kondisi fisik, perubahan lokasi yang tidak tercatat, serta keterlambatan pembaruan status aset. Faktor penyebabnya antara lain perpindahan barang tanpa pencatatan, perubahan kondisi yang belum ter-update, serta kurangnya dokumentasi pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan disiplin pencatatan masih diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data BMN.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem dan prosedur pengelolaan BMN telah diterapkan dengan baik, faktor implementasi di lapangan tetap menjadi penentu utama keberhasilan pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal guna mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui siklus pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Implementasi pengelolaan BMN didukung oleh pemanfaatan sistem informasi seperti SIMAN dan SAKTI yang berperan dalam meningkatkan akurasi data, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan aset negara. Secara umum, pelaksanaan pengelolaan BMN telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan di lingkungan KPPBC TMP C Sumbawa. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan BMN. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi adanya aset yang terindikasi idle atau belum dimanfaatkan secara optimal, pemanfaatan aset oleh pihak eksternal tanpa izin yang sah, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan data yang tercatat dalam sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pengawasan, pemanfaatan, dan penatausahaan BMN masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengelolaan BMN tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga dukungan pengendalian internal yang kuat serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai agar aset negara dapat memberikan manfaat optimal secara ekonomis dan administratif.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN, KPPBC TMP C Sumbawa perlu memperkuat pengawasan aset, khususnya yang berada di luar area kantor, serta menertibkan pemanfaatan tanpa izin. Aset yang terindikasi idle perlu segera dioptimalkan pemanfaatannya

agar memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap PNPB. Selain itu, peningkatan kualitas penatausahaan melalui pemutakhiran data dan disiplin pencatatan, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi sistem informasi, menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih akuntabel dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, M. R., & Santoso, A. B. (2024). *Status Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Barang Milik Negara*. 2(4), 793–802.
- Alamsyah, R., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Negara: Inklusi dan Peluang Ekonomi Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro, dan Kecil di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Rachmat*. 11(1), 105–116.
- Ansari, P., & Yohanes, Y. (2026). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Studi Kasus Pencatatan Aset Tanah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau)*. 5(6), 515–522.
- BPKP. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Cornelia, E. (2026). *KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C BENGKALIS BAGIAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS*.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kemala, F. (2021). *Public Administration Journal Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021 Journal I La Galigo : Public Administration Journal*. 4, 38–47.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan (2021).
- Labuhane, K. N., Fakhruddin, D., & Rahman, A. (2025). *Peran Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam Mewujudkan*. 5(3).
- Labuhane, K. N., & Rahman, A. (n.d.). *Optimalisasi Peran Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel Optimizing the Role of the Directorate General of State Assets in Realizing Transparent and Accountable Governance of State-Owned Assets*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nasution, A. Z., Fadhilah, N., & Hasibuan, A. (2024). *PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KANTOR BNN*. 18(1), 1053–1058.
- Sesylia, B., & Anarys, P. (2026). *Inventarisasi Barang Milik Negara dalam Mendukung Akuntabilitas dan Good Governance Pengelolaan Aset Publik di Perwakilan BPKP Provinsi*

Jawa Timur. 4, 361–369.

Siregar, D. (2020). *Manajemen Aset Strategis*. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)*. 5(2), 251–259.

Tempati, D., Pratama, H. Y., Farhan, M., Muhammad, F., & Piranti, N. M. (2025). *Integrasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Keimigrasian* *Integration of Information Technology in the Management of State Assets in the Immigration Environment* Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu. 8(10), 6286–6293.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8686>

Tranggana, T. (2024). *Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tripta Tranggana Universitas Islam Indonesia Sekret. 2(2).*